

# **RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PERTANIAN DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS**

**Rismayanti<sup>1</sup>, R. Didi Djadjuli,<sup>2</sup> H. Ahmad Juliarso,<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh responsivitas Pemerintah Desa Dalam mengembangkan potensi pertanian di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui responsivitas Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yang merupakan Perangkat Desa Cimaragas serta masyarakat sebagai pelaku pertanian di Desa Cimaragas. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa responsivitas Pemerintah Desa Dalam mengembangkan potensi pertanian di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini dikarenakan Pemerintah desa kurang mampu merespon kebutuhan para petani dan Pemerintah desa kurang mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani serta Pemerintah desa belum dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.*

***Kata Kunci : Responsivitas, Pemerintahan Desa, Potensi Pertanian***

## **PENDAHULUAN**

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat . Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah.

Pembentukan instansi-instansi pemerintah tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat sebagaimana tujuan dari Administrasi Publik adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat di berbagai bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu

Instansi yang dibentuk oleh Pemerintah di daerah yaitu Desa.

Dewasa ini, kedudukan peranan Desa berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Negara. Hal ini dikarenakan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo, Desa dijadikan ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurut Sujadi, dkk (2014: 231) “istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.” Sedangkan Hanif Nurcholis ( dalam Sujadi, dkk. 2014: 231) mengatakan bahwa: Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal (3) dan (4). Di samping itu, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal (25) bahwa: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.” Dalam memberikan pelayanan publik maka

pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana dikemukakan Fahmi (2013: 2) bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *Profit Oriented* dan *Non Profit Oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.”

Pemerintah Desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional. Ini berarti bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan yang terdekat dengan masyarakat karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan potensi Desa di sektor pertanian agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Pembangunan disektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik pertanian rakyat maupun pertanian yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya alam yang memadai dan jumlah penduduk (tenaga kerja) yang bekerja disektor pertanian yang sangat banyak. Kelapa sawit, Karet dan Padi merupakan salah satu komodasi perkebunan yang perannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya bagi penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kelapa sawit, Karet, dan Padi juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.

Peran pemerintah dalam sektor perekonomian semakin besar. Keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian desa memiliki dua dampak yaitu positif dan juga negatif. Masalahnya bukan di seberapa banyak pemerintah ikut serta dalam hal ini tetapi lebih ke bidang apa yang kiranya pemerintah mampu untuk membantu masyarakat untuk mencapai keuntungan dalam berusaha sehingga mampu memajukan perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi sebuah persoalan yang didapat dari kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintahan yang menyangkut tentang kepentingan bidang perekonomian.

Peran Pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modern dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitar saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan potensi desa.

Desa Cimaragas terletak di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Desa Cimaragas berada pada

wilayah yang strategis, karena desa tersebut berada pada jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Sebagian masyarakat Desa Cimaragas menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, untuk itu Pemerintah Desa dituntut jeli dalam mengembangkan maupun menggali potensi pertanian di Desa Cimaragas. Namun berdasarkan fakta di lapangan, kinerja pemerintah desa dalam mengembangkan potensi pertanian di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis masih memiliki kelemahan. Salah satunya disebabkan oleh adanya sumber daya aparatur pemerintah desa yang belum sepenuhnya memadai sehingga dalam hal mengembangkan potensi pertanian, yang akhirnya dapat berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, dan produktivitas pertanian menjadi kurang maksimal. *Responsivitas* pemerintah desa pun dirasakan oleh masyarakat Desa Cimaragas masih kurang maksimal, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat masih belum terpenuhi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tentang kinerja pemerintah desa yang masih lemah dalam pelayanan publik, dapat diketahui indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pemerintah desa masih belum maksimal dalam melakukan inovasi

terkait pengembangan potensi pertanian, sehingga produktivitas pertanian kurang optimal.

2. Respon pemerintah Desa dalam menanggapi keluhan para petani masih kurang baik, sehingga permasalahan – permasalahan yang dialami oleh para petani belum terselesaikan.
3. Masih adanya kebijakan yang menyulitkan petani seperti halnya pembuatan SK (Surat Keputusan) kelompok tani yang dirasa masih berbelit - belit.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah jurnal yang berjudul **“Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis”**.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik agar dapat sesuai dengan keinginan masyarakat (responsivitas). Secara singkat tanggap berarti kejelasan antara kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pelayanan, sehingga pemerintah desa harus memiliki daya tanggap dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Sugandi dalam Herdini & Widiyarta (2020), Responsivitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan aparatur negara

dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, kebutuhan baru dan ide formula baru, menyebabkan administrasi publik bereaksi dengan cepat sehingga agar tidak ketinggalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan oleh penyedia pelayanan. Zeithml, dkk dalam Risnawati (2015) telah merinci dan menegaskan bahwa daya tanggap termasuk dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, dimana daya tanggap (Responsivitas) mencakup beberapa indikator angka, yaitu:

- a. Kemampuan merespon masyarakat  
Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga menjadi petugas jaga harus tahu bagaimana bersikap, berkomunikasi dengan baik, dan santun kepada masyarakat.
- b. Kecepatan melayani Pelayanan yang cepat artinya petugas sigap dan ikhlas dalam menanggapi pertanyaan atau permintaan dari masyarakat.
- c. Ketepatan melayani Melayani dengan baik, yaitu dalam melayani harus bebas dari kesalahan dalam pekerjaan maupun dalam percakapan, dalam pengertian ini pelayanan yang diberikan oleh pejabat harus sesuai dengan keinginan masyarakat.
- d. Kecermatan melayani Ketepatan dalam pemberian pelayanan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Pelayanan yang penuh perhatian artinya pemerintah harus

- selalu fokus dan serius dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- e. Ketepatan waktu melayani Tujuan pelayanan tepat waktu adalah petugas pelayanan masyarakat harus melakukan pelayanannya dalam waktu yang telah ditentukan.
  - f. Kemampuan menanggapi keluhan Setiap unit usaha publik bertanggungjawab untuk menyelesaikan semua pengaduan dan pengaduan masyarakat atas ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah desa berkepentingan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus responsif terhadap pelbagai kepentingan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif Moleong (2014: 6) mengemukakan bahwa: Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistic, dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Responsivitas merupakan tanggapan pemerintah Desa terhadap kebutuhan-kebutuhan para petani dalam meningkatkan potensi pertanian. Dalam dimensi ini terdapat 3 (tiga) indikator yang akan dibahas yaitu; Pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani, Pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani dan Pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.

Untuk selanjutnya pada dimensi responsivitas berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti

urakian melalui indikator-indikator sebagai berikut:

### **1. Pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani.**

Indikator pertama dalam dimensi resposivitas yaitu pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang informan terkait pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani. Berikut adalah uraian hasil wawancara dengan beberapa informan:

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa indikator pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 dari 8 informan menyatakan bahwa respon pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan petani belum optimal. Sementara 2 dari 8 informan menyatakan bahwa pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani.

Berdasarkan hasil observasi pada pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui pemerintah desa dinilai kurang merespon kebutuhan petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Seperti halnya penyuluhan yang awalnya akan dilaksanakan 3 – 4 kali dalam setahun namun hanya 1 kali dalam satu tahun. Kemudian petani mengajukan permohonan bantuan mesin penggilingan padi belum dapat di realisasi. Pemerintah Desa haruslah berperan aktif dalam meningkatkan potensi pertanian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soedewo, Siti (2019: 173) menyatakan bahwa dukungan pemerintah dalam mendorong penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilihat dalam hal layanan pendidikan dan latihan (diklat) petani tentang pupuk organik, pengendalian hama, penyakit secara hayati, dan layanan konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan teori dapat diketahui bahwa Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada indikator pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani yaitu para petani khususnya menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintah Desa dalam meningkatkan potensi pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kebutuhan petani yang belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah Desa diantaranya pengajuan mesin gilingan padi yang belum terrealisasikan dan masih ada kebutuhan lainnya yang belum dapat direalisasikan.

Pemerintah Desa haruslah berperan aktif dalam meningkatkan potensi pertanian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soedewo, Siti (2019: 173) menyatakan bahwa dukungan pemerintah dalam mendorong penerapan sistem pertanian berkelanjutan dapat dilihat dalam hal layanan pendidikan dan latihan (diklat) petani tentang pupuk organik, pengendalian hama, penyakit secara hayati, dan layanan konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan teori dapat diketahui bahwa Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada indikator pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani yaitu para petani khususnya menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintah Desa dalam meningkatkan potensi pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kebutuhan petani yang belum dapat terpenuhi oleh Pemerintah Desa diantaranya pengajuan mesin gilingan padi yang belum terrealisasikan dan masih ada kebutuhan lainnya yang belum dapat direalisasikan.

Hambatan dalam adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa terkait pengembangan potensi pertanian, dapat diketahui hambatannya masih ada petani yang belum terpenuhi kebutuhannya. Seperti pengadaan alat penggilingan padi yang belum terrealisasi.

Adapun upaya dalam menanggulangi hambatan pada indikator adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa terkait pengembangan potensi pertanian yaitu, Pemerintah Desa melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait serta Pemerintah Daerah dalam pengadaan mesin penggilingan padi.

## **2. Pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani.**

Indikator kedua dalam dimensi resposivitas yaitu pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang informan terkait pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani. Berikut adalah uraian hasil wawancara dengan beberapa informan:

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa indikator pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh informan menyatakan bahwa pemerintah desa belum mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani.

Berdasarkan hasil observasi pada pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari penyuluhan yang awalnya akan dilaksanakan 3 – 4 kali dalam setahun namun hanya 1 kali dalam satu tahun. Kemudian petani mengajukan permohonan bantuan mesin penggilingan padi belum dapat di realisasi. Pemerintah Desa haruslah berperan sentral dalam meningkatkan potensi pertanian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dauwole et al., (dalam Angelia dkk., 2020: 44) menyatakan bahwa: “Desa sebagai fasilitator yaitu Pemerintah sebagai fasilitas dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat khususnya

petani melalui usaha yakni usaha pertanian di bidang agribisnis. Hal ini membuat Pemerintah Desa bergerak untuk melakukan peningkatan potensi dari pertanian desa agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan dengan kualitas yang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan teori dapat diketahui bahwa Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada indikator pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani yaitu pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya agenda-agenda penyuluhan bagi petani yang belum dapat dilaksanakan.

Hambatan dalam adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa terkait pengembangan potensi pertanian, dapat diketahui hambatannya pemerintah desa belum mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani.

Adapun upaya dalam menanggulangi hambatan pada indikator pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani yaitu, Pemerintah Desa mengkoordinir setiap kelompok tani yang ada di Desa Cimaragas yang kemudian menyusun kembali agenda penyuluhan agar dapat dilakukan secara berkala.

### **3. Pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.**

Kemudian indikator ketiga dalam dimensi resposivitas yaitu pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang informan terkait pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani. Berikut adalah uraian hasil wawancara dengan beberapa informan:

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa indikator pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh informan menyatakan bahwa pemerintah desa belum dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.

Berdasarkan hasil observasi pada pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari penyuluhan yang awalnya akan dilaksanakan 3 – 4 kali dalam setahun namun hanya 1 kali dalam satu tahun. Kemudian petani mengajukan permohonan bantuan mesin penggilingan padi belum dapat di realisasi. Untuk meningkatkan potensi pertanian diperlukan pembinaan secara

berkala dan berkesinambungan oleh Pemerintah Desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution et al., (2022: 45) menyatakan bahwa: “Pemerintah melakukan pembinaan kelembagaan kelompok petani secara berkesinambungan dan beorientasi pada pola pengembangan masyarakat, yang kemudian diarahkan pola pikir petani dalam menerapkan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif terhadap kelompok petani sehingga dapat memaksimalkan program pemerintah dalam pengembangan potensi pertanian yang berada di desa.”

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan teori dapat diketahui bahwa Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada indikator pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani dapat diketahui bahwa pemerintah Desa belum mampu mengembangkan program-program pelayanan public, dapat dilihat dari masih banyaknya agenda-agenda penyuluhan bagi petani yang belum dapat dilaksanakan.

Hambatan dalam pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani yaitu Pemerintah Desa belum mampu mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.

Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pada indikator pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani yaitu Pemerintah desa sudah menyusun agenda untuk melaksanakan program-program pelayanan publik khusus bagi para petani.

Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada dimensi Responsivitas belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari indikator pemerintah desa mampu merespon kebutuhan para petani, pemerintah desa mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani dan pemerintah desa dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani belum optimal. Responsivitas merupakan daya tanggap pemerintah desa dalam memenuhi aspirasi para petani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lenvine (dalam Dwiyanto, 2008:143) menyatakan bahwa responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Responsivitas

Pemerintah Desa Dalam mengembangkan potensi pertanian di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum optimal hal ini dikarenakan Pemerintah desa kurang mampu merespon kebutuhan para petani dan Pemerintah desa kurang mampu menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani serta Pemerintah desa belum dapat mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.

Adanya hambatan dalam Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yaitu sulitnya pemerintah desa belum mampu menyusun agenda dan prioritas sesuai kebutuhan para petani dan pemerintah desa kesulitan dalam mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk menanggulangi hambatan pada responsivitas Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yaitu pemerintah desa menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan para petani dan pemerintah desa sedang mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para petani.

#### DAFTAR PUSTAKA

Fatnuriawan, Ayok. 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak Kecamatan Plehmahan Kabupaten Kediri Tahun 2014. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel07B560DD628F3463CACE7469F8A157F.pdf> [7 Maret 2018]

- Hariyantho, Asep Oky. 2009. Pengaruh Kinerja Perangkat Desa Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Pemberian Surat Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa saguling Kecamatan Bareggeg Kabupaten Ciamis. Skripsi FISIP Universitas Galuh Ciamis : Tidak diterbitkan.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komarudin. 2014. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Genesindo.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor 23  
Tahun 2003 Tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik